

Judul Rapat:**Rapat Koordinasi Identifikasi Kebutuhan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Politeknik Pariwisata Medan**

Hari/ Tanggal : Jumat, 11 September 2020

Waktu : 09.00 – 11.30 WIB

Tempat : Politeknik Pariwisata Medan, Jl. Rumah Sakit H. No.12, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara

Agenda :

1. Pembukaan
2. Diskusi
3. Penutupan

Pemimpin Rapat:

R. Adi Mukhtar Rivai (Koordinator Bidang Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan)

Peserta Rapat:

1. Dr. Anwari Masatip, S.Sos., MM. Par (Direktur Politeknik Pariwisata Medan)
2. Zumry Sulthony, S.Sos, M.Si, CHE (Wakil Direktur III)
3. Dr. Ngatemin, S.Pd, M.Si (Kepala Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Umum)
4. Bejo Mulyadi, SE, M.Si (PPK/Dosen)
5. Joko Abu Bakir, S.Sos (Subkoordinator Pendidikan dan Pelatihan)
6. Grace Cornelia Marchtina
7. Reysa Hastarimasuci
8. Jajang Nurjaman

Hasil Rapat:**Agenda 1:****Pembukaan**

Kegiatan rapat koordinasi diawali dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan oleh Bapak R. Adi Mukhtar Rivai selaku Koordinator Bidang Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan. Maksud dari Bidang Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah untuk melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi ASN, khususnya apa saja yang dibutuhkan oleh ASN di Poltekpar Medan. Pada waktu kegiatan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, pihak BKPP sudah mendapatkan hasil isian kuesioner kebutuhan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi yang diberikan oleh Poltekpar Medan. Namun, pihak BKPP perlu untuk mengetahui secara detail.

Bapak Adi juga menyampaikan bahwa pihak BKPP di bawah Pusbang SDM Parekraf telah mengadakan diklat berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan dari unit-unit kerja. Sampai dengan saat ini diklat yang sudah dilaksanakan secara mandiri adalah legal drafting dan policy brief. Namun ada pula diklat yang dilaksanakan dengan sistem mengirimkan peserta kepada instansi maupun lembaga pendidikan dan pelatihan seperti diklat PPK, diklat MASN, diklat Etika dan Jurnalisme Hukum dalam Media dan masih banyak lagi. Bapak Adi juga menyampaikan contoh peserta yang diajukan oleh Badan Otorita Danau Toba untuk mengikuti diklat policy brief di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pusbang SDM Parekraf dan mampu menjadi salah satu peserta terbaik. Hal itu membuktikan adanya antusias dari peserta pihak Badan Otorita dan diharapkan antusias tersebut juga bisa dirasakan oleh pihak PTNP. Untuk saat ini, koordinasi dilakukan guna mengidentifikasi kebutuhan di tahun 2021.

Agenda 2:**Diskusi**

Pihak Poltekpar Medan menerima dengan baik kedatangan Tim BKPP untuk melakukan identifikasi kebutuhan kompetensi ASN di Poltekpar Medan. Usul dari Pihak Poltekpar Medan terkait adanya beasiswa dengan tugas belajar, bila memungkinkan dapat diberikan kepada para Dosen di PTNP dengan mekanisme “biaya pendidikan”, tentunya dengan memberikan “ijin belajar”, hal ini dimaksudkan agar dosen yang bersangkutan tetap dapat mengajar di lingkungan PTNP. Alasannya adalah

apabila dosen melakukan tugas belajar dalam jangka waktu yang cukup lama, pembelajaran akan berjalan tidak efektif dikarenakan, tenaga Dosen/pengajar di lingkungan Poltekpar Medan masih kurang.

Setelah itu, Bapak Adi menjelaskan mengenai mekanisme Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi (P2BK) yaitu bagaimana pihak Pusbang akan melaksanakan profiling untuk mengetahui rencana karir ASN di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf. Selain itu, hal tersebut berguna untuk mengetahui pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi apa yang perlu diambil oleh ASN tersebut. Hasil dari pendidikan dan pelatihan tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk raport untuk mengetahui perkembangan serta mendapatkan *feedback* dari pelatihan yang sudah dilakukan.

Bapak Anwari menyampaikan bahwa sertifikat dan raport yang diberikan sesuai mengikuti pelatihan adalah hal yang baik namun disarankan untuk memberikan nomor sertifikat dan nomor raport sehingga nantinya bisa digunakan untuk kebutuhan akademik di tingkat Perguruan Tinggi. Selain itu, diharapkan adanya perhatian lebih kepada PTNP mengenai kebutuhan diklat bagi para pegawai di PTNP.

Bapak Adi juga menjelaskan rencana Pusbang SDM Parekraf untuk melaksanakan diklat Pariwisata Dasar dan rencana akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan sehingga nantinya dapat melaksanakan diklat Pariwisata Dasar secara mandiri. Target yang direncanakan tahun ini untuk dapat dilaksanakan kepada seluruh ASN di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf namun harus ditunda dikarenakan kondisi pandemi.

Berdasarkan hasil diskusi dengan Poltekpar Medan, kebutuhan diklatnya adalah kebutuhan usulan Diklat PIM IV untuk 3 orang pegawai dan Diklat PIM III untuk 1 orang pegawai. Selain itu adanya kebutuhan diklat *soft skills* yang targetnya adalah untuk pegawai eselon III ke bawah.

Selain mendiskusikan identifikasi kebutuhan diklat, Poltekpar Medan juga menyampaikan permasalahan internal yang ada diantaranya adalah: kebutuhan jabatan fungsional untuk melakukan tugas teknis dukungan manajemen. Saat ini tugas manajemen teknis masih dirangkap oleh para dosen yang ditunjuk, sehingga terdapat double job desc, sehingga selain sebagai dosen yang bertugas mengajar, mereka juga harus menjalankan

roda administrasi/manajemen di PTNP. Terkait dengan jabatan fungsional yang ada di lingkungan PTNP, masih terdapat kendala dalam hal pengumpulan angka kredit, dan sangat membutuhkan bimbingan dan sosialisasi jabatan fungsional.

Bapak Adi juga memberikan ide pelaksanaan profiling di Poltekpar Medan baik dengan sistem pengiriman asesor dari pihak LPT UI ke Medan atau pihak Poltekpar Medan yang datang ke Jakarta. Profiling nantinya berguna untuk mengetahui rencana karir setiap pegawai di lingkungan Poltekpar Medan khususnya bagi staf yang belum mengetahui jabatan fungsional yang akan diambil.

Agenda 3

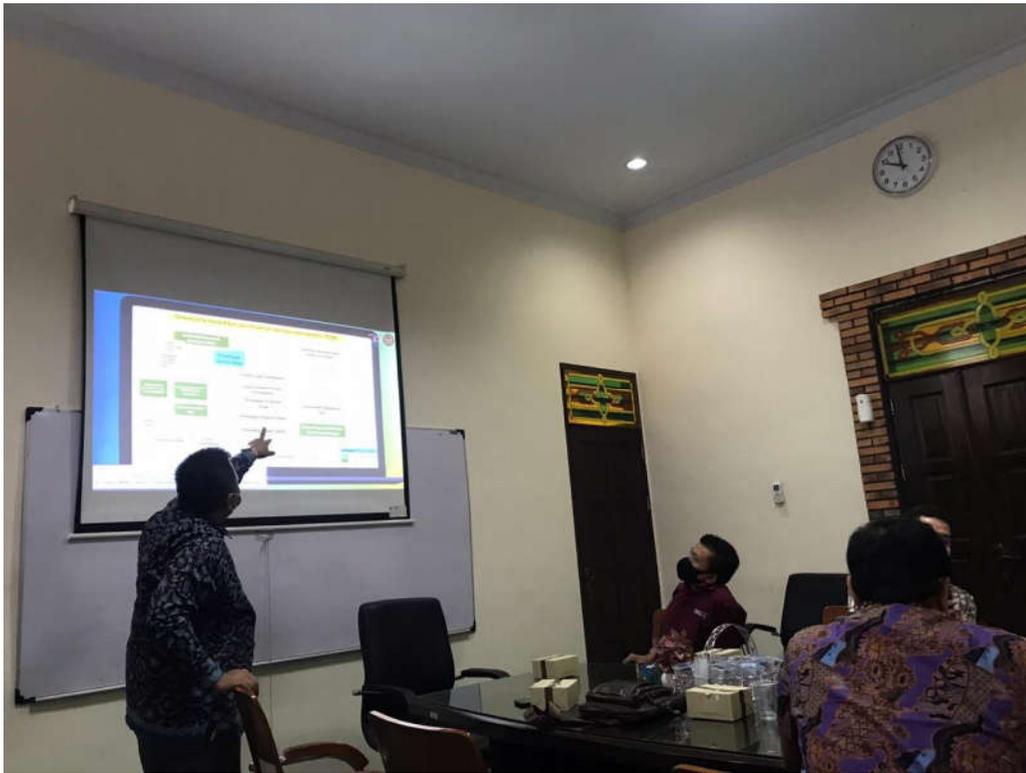
Penutupan

Rapat koordinasi hari ini ditutup dengan kesimpulan bahwa adanya beberapa tindak lanjut yang akan dilaporkan oleh Koordinator Bidang Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan kepada Kepala Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diantaranya adalah kebutuhan usulan diklat oleh Poltekpar Medan dan adanya beberapa permasalahan internal yang dialami oleh Poltekpar Medan.

Kesimpulan Rapat

1. Kebutuhan diklat di lingkungan Poltekpar Medan antara lain : Diklat PIM IV untuk 3 orang pegawai dan Diklat PIM III untuk 1 orang pegawai. Diklat Barang dan Jasa, Manajemen Keuangan Negara dan juga diklat *soft skills* yang targetnya adalah untuk pegawai eselon III ke bawah.
2. Permasalahan internal Poltekpar Medan antara lain adalah adanya double job desk antara tugas dosen dan tugas manajemen oleh para Dosen, dan tentunya mengganggu proses belajar mengajar sehingga perlu adanya koordinasi dengan Bidang Jabatan Fungsional dan Bidang Kerjasama dan Pendidikan Tinggi.
3. Poltekpar Medan juga bersedia dilaksanakan profiling agar dapat mengetahui rencana karir setiap pegawai di lingkungan Poltekpar Medan khususnya bagi staf yang belum mengetahui jabatan fungsional yang akan diambil.

DOKUMENTASI KEGIATAN





Pelaksana koordinasi,

R. Adi Mukhtar Rivai

Joko Abu Bakir

Grace Cornelia Marchtina

Reysa Hastarimasuci

Jajang Nurjaman